



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU LAIN  
DI KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR TINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:**

**ABD. AZIS**  
**NIM : 11521103931**

**PRORGAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrpsi dengan judul "LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU MELAYU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" yang di tulis oleh:

Nama : ABD AZIS

Nim : 11521103931

Progam Studi : Hukum Keluarga (S1)

dapat di terima serta di setuju untuk di ajukan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau.

Pembimbing skripsi

Pekanbaru, 19 juli 2021

Ade Fariz Fakhrollaah M. Ag

NIP:196711122005011006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"larangan Suku Bugis menikah dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir di tinjau menurut hukum islam"* yang ditulis oleh :

Nama : ABD AZIS  
NIM : 11521103931  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Jl. Kamboja, Panam, Pekanbaru, melalui (Google Meet)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2018

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi M.Ag**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Aslati M.Ag**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

**Dr. Zulkifli M.Ag**  
NIP. 19741006 200501 1 005





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abd. Azis,( 2021) : Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulaukijang Kabupaten Indragiri Hilir Di Tinjau Menurut Hukum Islam.**

Larangan (*femmali*) adat pernikahan Bugis dan suku yang lain adalah pernikahan yang sangat dilarang keras khususnya Suku Bugis kepada anak-anak dan cucu mereka untuk memilih calon istri dan suami yang bersuku melayu, ada beberapa anggapan apabila pernikahan tersebut di langgar karena anggapan mereka ketika Suku Bugis menikah dengan suku yang lain akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka, musibah, dan keluarga mereka mengkucilkan, yaitu di *fa'bici* (dikucilkan) dan ada juga diantara mereka tidak menganggap sebagai anak dari keturunan mereka. Larangan keras ini sangat keras khususnya Suku Bugis yang memiliki darah bugis **Boswa** (bugis *bone*, bugis *soppeng*, dan bugis *wajo*,). Menurut mereka larangan adat pernikahan Suku Bugis dengan suku yang lain yang ada RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, suatu tradisi yang harus selalu di ikuti karena ini merupakan adat dari nenek Moyang mereka. Dan suatu yang harus diyakini dan ditaati oleh masyarakat yang besuku Bugis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan tokoh Masyarakat serta pandangan Hukum Islam mengenai larangan adat Suku Bugis menikah dengan suku yang lain. yang berada Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), metode dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan di tambah dengan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Menurut tinjauan Hukum Islam, larangan adat Suku Bugis menikah dengan suku yang lain sangatlah bertentangan dengan syara' karena tidak ada nash yang mengatakan bahwa terlarangnya suatu pernikahan karena larangan adat. Larangan adat ini di Haramkan karena sangat tidak sesuai dengan ketentuan agama islam yang melarang pernikahan karena adat. Serta larangan juga dapat merusak hubungan silaturahmi antar suku dan putusnya hubungan silaturahmi serta menimbulkan kesalah pahaman dalam berbangsa.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah ﷻ. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammadﷺ, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul **“LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU LAIN DI KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.”** Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Teristimewa untuk keluargaku tercinta khususnya Marwiyah Dan Ramli Usman yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada abang (Moh Amin), kakak (Nur Aidah) adik (Aini R) adik (Mawaddah R) yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH., MH dan Bapak Muslim, S.Ag.S.H.,M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Aprizal Ahmad M.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak H. Dr. Zulkayandri, MA selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih sarjana.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah banyak membantu
8. Teman-teman angkatan 2015 jurusan hukum keluarga yang memberi semangat selalu.
9. Teman-teman Anzu Friapliayanti, Nur Diana, adzim an-nafi, dan semua sahabat yang tak dapat saya sebutkan satu per satu yang ikut serta memberikan dukungan, semangat, dan motivasi .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati. Akhir kata penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu watata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Penulis

ABD AZIS

NIM. 11521103931



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I                    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II                GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>KELURAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN</b>	
<b>INDRAGIRI HILIR.</b>	
A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang.....	14
B. Kondisi Geografis.....	17
C. Jumlah Penduduk .....	18
D. Mata Pencaharian.....	20
E. Pendidikan.....	21
F. Kepegawaian.....	22
G. Agama.....	23
<b>BAB III                KAJIAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	25





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Pengertian Pernikahan.....	25
2. Tujuan Pernikahan.....	28
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	29
4. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi.....	31
B. Konsep Urf dalam Pernikahan.....	42
1. Pengertian urf.....	42
2. Pembagian urf.....	44
3. Syarat pembagian urf yang di jadikan dasar hukum.....	46
4. Kedudukan urf dalam sumber hukum islam.....	47
5. Hukum dapat berubah karena perubahan urf.....	48
C. Ketentuan adat tentang pernikahan suku bugis.....	50
1. Madduta Massuro/Lettu.....	50
2. Mammanu'-manu.....	51
3. Mappettu Ada.....	51
4. Akad Nikah.....	55
5. Upacara Sesudah Akad Nikah.....	56

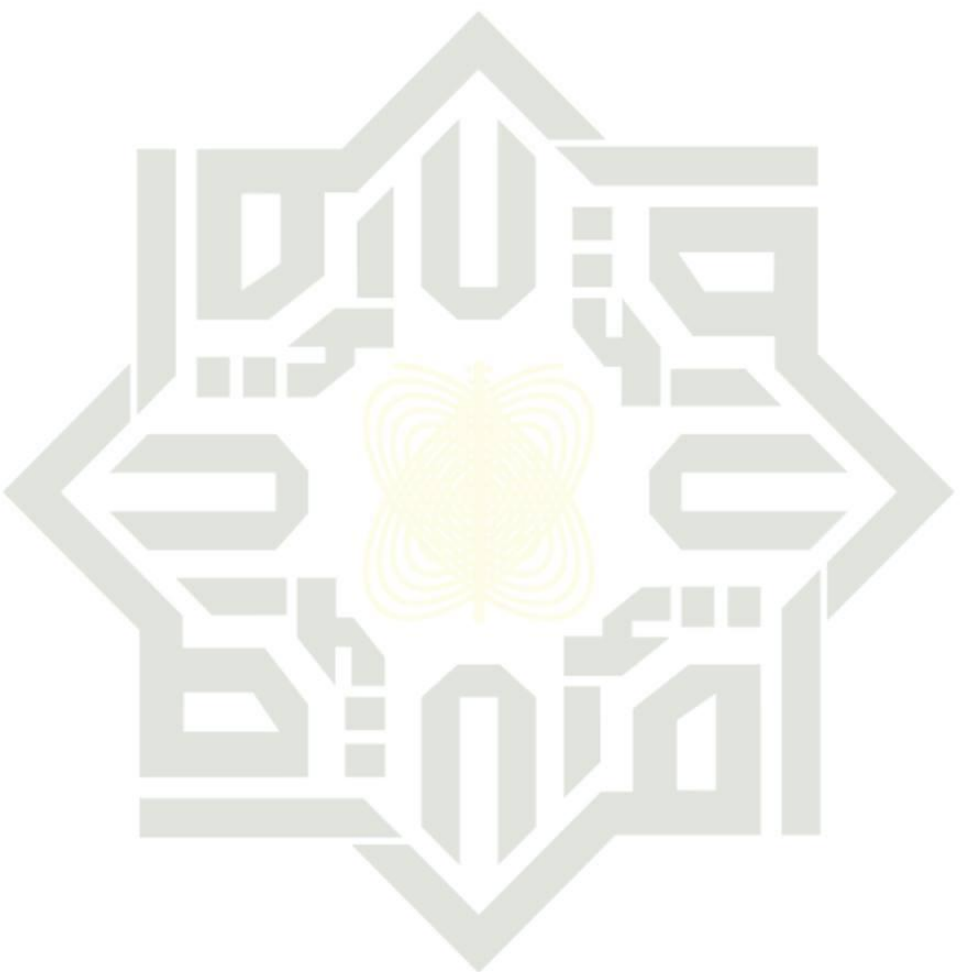
## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Larangan Perkawinan Suku BugisDan Melayu di Desa Pulu Kijang Kecamatan Reteh.....	42
B. Pandangan Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang Terhadap Larangan Pernikahan Suku BugisDan Melayu.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Suku Bugis Dan Suku yang lainRT 002 Kelurahan Pulau Kijang Kecamtan Reteh.....	58

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

## DAFTAR KEPUSTAKAAN



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1	Jumlah Penduduk RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel I.2	Jumlah Penduduk RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa.....	19
Tabel I.3	Perkebunan Di Kelurahan Pulau Kijang.....	20
Tabel I.4	Komposisi Mata Pencharian RT 002 Kelurahan Pulau Kijang.....	21
Tabel I.5	5 Klasifikasi Penduduk RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Menurut Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel I.6	Stuktur Kepegawaian Kelurahan Pulau Kijang.....	22
Tabel I.7	Jumlah Suku Bugis dan suku yang lain RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Agama.....	23





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia yang lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.<sup>1</sup> Pergaulan dengan manusia itu di sebut dengan proses sosial. Proses tersebut itu dinamakan pengaruh antara timbal balik antar berbagai segi kehidupan bersama.<sup>2</sup> Masyarakat terbentuk mulai dari individu-individu membentuk suku-suku, kemudian suku-suku membentuk menjadi bangsa-bangsa. Hal ini sudah di jelaskan oleh Allah SWT. dalam firmanNya dalam surah Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 1

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 65



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan-Nya bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya.

Dalam suatu hadits riwayat Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu Mulaikah berkenaan turunnya ayat ini ialah bahwa ketika fathu Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk adzan. Beberapa orang berkata, "Apakah pantas budak hitam adzan di atas Ka'bah?". Maka berkatalah yang lain, "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya. "Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah saw apa yang mereka ucapkan. Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, pangkat, kekayaan, dan keturunan dan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah dinilai dari derajat ketakwaannya.

Persaudaraan merupakan pilar masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari-jemari." (HR.Muttafaq'alaih)

Dari ayat tersebut jelaslah Allah SWT. telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam dan di persatukan menjadi satu-kesatuan dengan berbangsa dan bersuku-suku untuk membangun kehidupan bersama.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang wilayahnya sangat luas, dari Sabang sampai

<sup>3</sup> A. Hasan Ridwan , *polemic pernikahan*, (Semarang: Grafindo, 1994). h. 34



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Merauke. Dengan penduduknya yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa dengan berbagai bahasa, adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Adat dan kebiasaan masyarakat di bangun atas dasar nilai yang di anggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut di ketahui, di pahami, di sikapi dan di laksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Sikap-sikap ini yang mendasar dan umum yang membentuk nilai-nilai yang disepakati anantara anggota-anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Nilai-nilai yang memarankan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial, hukum juga banyak mengadopsi nilai-nilai yang terbentuk dan berkembang yang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat. Apabila terjadi sesuatu yang melanggar oleh hukum adat maka yang mengadili adalah pengadilan adat yang bersangkutan.

Mengenai adat, islam sudah mengaturnya karena di dalam kehidupan tiap gerak berawal dari agama, Berujung pada suatu kebudayaan. Adat telah di atur oleh agama di dalam kaidah *fiqqhiyyah* yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat di jadikan suatu pertimbangan hukum. ini merupakan kaidah yang kelima dari kaidah yang terbesar didalam fikih Islam. Yaitu kaidah *al 'adatu muhakkamah* (أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam. Dan begitu seterusnya.<sup>5</sup>

Dalam kaidah tersebut Islam memberikan suatu dasar yang masih umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Adat yang berkembang di masyarakat dan di atur oleh hukum adat mengenai perkawinan dan pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat satu ada yang berbeda dengan masyarakat adat yang lain.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu janji yang suci sebagai gerbang untuk memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi seperuh iman. Sekitar dua pertiga kehidupan manusia di jalani dalam keluarga yang di bentuk bersama oleh pasangan suami istri. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki suatu kesiapan yang bagus untuk menempuh suatu jalan yang baik.

Islam juga telah mengatur mengenai tata cara pernikahan secara rinci. Berpasang-pasangan merupakan suatu pola yang telah di tentukan Allah SWT. Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu jalan atau cara yang di pilih Allah SWT. kepada makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Akan tetapi tidak hanya sampai di situ saja pernikahan juga mempunyai unsur-unsur ibadah, karena pernikahan juga dapat menjaga diri sendiri dan pasangan agar tidak

<sup>5</sup> Djzuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Bandung: Nusa Media, 2008), cet ke-2, h. 65



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjerumus oleh hal-hal yang dapat menyebabkan manusia untuk masuk kedalam api neraka.<sup>6</sup>

Menikah dianjurkan dalam agama. Menikah memberikan ketenangan karena pasangan suami istri saling berkasih sayang dan mencintai pasangannya masing-masing karena Allah SWT. sebagaimana doa yang kita ucapkan kepada setiap pasangan yang baru menikah, yakni semoga menjadi pasangan yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.<sup>7</sup>

Dengan menikah, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan, rasa cinta, dan berkasih sayang kepada semua makhluk, terutama semua pasangannya. Ketika semua ini bisa tercapai, kita sebagai manusia akan mencapai puncak kebermaknaan hidup sehingga kita bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, berbagi dan bermanfaat bagi orang lain.

Kehidupan berumah tangga pada hakikatnya adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, istri adalah ratunya dan anak-anak adalah rakyatnya. Suami adalah raja yang memimpin kerajaan dan mengendalikan semua urusannya karena dialah yang menerima beban serta tanggung jawab dan amanat terhadap keluarganya<sup>8</sup>. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 34.

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 5

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 3

<sup>8</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Kado untuk suami istri*, (Jakarta: Gema insani, 2014), Cet. Ke-1, h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. (Q.S. An-Nisa.04:34)

Adat pernikahan yang masih berlaku hingga saat ini di pernikahan masyarakat yang ada RT 002 Kelurahan Pulau Kijang kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, sebagai suatu kelompok Entik yang memiliki berbagai macam atribut sebagai Manifestasi sebagai keberadaanya, termasuk dalam hal perkawinan.

Tercantum dalam adat yang ada dan turun temurun di Suku Bugislarangan "femmali" menikah dengan suku melayu. Suku Bugisterkenal dengan watak atau pemikiran yang keras, mau saling membunuh dan mau mati demi sesuatu perkara yang kecil meski dengan hal yang sangat sepele. Begitu juga halnya dengan suku yang lainyang juga tidak jauh berbeda watak dan pemikirannya terhadap sesuatu hal yang kecil ataupun besar.

Mengenai hal ini keluarga bugis sangat melarang keras anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk dinikahkan anaknya dengan suku yang lainkarena beberapa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor terlarang pernikahan yang telah berjalan secara turun temurun, dan sangat dianjurkan untuk menikahkan anaknya dengan sebangsa mereka (Satu Suku) walaupun dengan hantaran yang tinggi. berbeda halnya dengan suku yang lain.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran pernikahan antara Suku Bugis dengan suku yang lain adalah pihak dari Suku Bugis diharuskan memberi tanda permohonan izin atas pelanggaran yang di perbuatnya berupa emas suasa seukuran benang jahit dan emas tersebut diukur sesuai tinggi badan kepala adat Suku Bugis sebagai tanda penghormatan dan permohonan maaf atas pelanggaran yang di lakukannya. Kemudian emas tersebut dibagikan kepada tokoh-tokoh yang bersangkutan dan dimanfaatkan bagi banyak orang. dan adapun denda tersebut pernah berlaku pada tahun 1991-1992 yang lalu.<sup>9</sup>

Di samping itu, walaupun pada saat ini sanksi memberikan emas kepada kepala adat tidak diberlakukan lagi, namun larangan ini tetap berlaku dan tetap menjadi sesuatu yang harus dipatuhi oleh masyarakat Suku Bugis RT 002 Kelurahan Pulau Kijang.

Adapun beberapa alasan Suku Bugis melarang pernikahan antara dengan suku yang lain karena anggapan mereka adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Bugis di anjurkan menikah satu suku
2. Dalam adat bugis ada uang *Pana'I* yang tidak terdapat dalam adat lain.

<sup>9</sup> Ramli Usman , Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, tgl 18 september 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Bugis di anjurkan menikah satu suku walaupun dengan hantaran yang tinggi.<sup>10</sup>

Namun dari sekian alasan di atas tidak ada satu pun alasan yang tertera atau sesuai dengan larangan perkawinan menurut Hukum Islam. Terhadap masalah yang terjadi itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan bagaimana fikih menyikapi permasalahan tersebut. Dari uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul skripsi “LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU YANG LAIN DI KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar maka penulis membatasi hanya membahas sekitar larangan pernikahan Suku Bugis dengan suku yang lain menurut hukum adat yang ada di RT 002 Kelurahan Pulau Kijang itu sendiri. Pembahasan tentang larangan pernikahan yang ada di Suku Bugis dan denda karena melanggar aturan adat. Tinjauan Hukum Islam mengenai adat tersebut yang terjadi RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.

#### C. Rumusan masalah.

Sesuai dengan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

<sup>10</sup> Drs. H. Sayuti Anhar, Kepala Adat Suku Bugis Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, tgl 21 september 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa penyebab terlarangya pernikahan Suku Bugis dengan suku yang lain yang ada di RT 002 Kelurahan Pulau Kijang ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan Suku Bugis menikah dengan suku yang lain di RT 002 Kelurahan Pulau Kijang?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab larangan pernikahan di Suku Bugis yang ada di RT 002 Kelurahan Pulau Kijang.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat yang ada di RT 002 Kelurahan Pulau Kijang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada,
- b. Dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi,
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam dan adat istiadat.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian ini RT 002 RW 003 Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah para tokoh adat dan tokoh agama, tokoh masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, serta masyarakat Bugis yang telah menikah dengan suku lain pada tahun 2021 ini.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah sampel.<sup>11</sup> Adapun jumlah populasi di RT 002 berjumlah 45 KK (kartu keluarga) yang bersuku bugis, Dan yang menikah pada tahun 2021 ini sebanyak 9 pasang. dalam penelitian ini yang mengetahui larangan Suku Bugis menikah dengan suku yang lain sebanyak 100 orang. Oleh sebab itu karena banyaknya jumlah populasi maka peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari: 1 orang tokoh adat Suku Bugis dan 2 orang tokoh adat suku Lain, 5 pasang (10 orang) Suku Bugis yang menikah dengan suku yang lain dan 1 orang tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat RT 002 Kelurahan Pulau Kijang, karena populasinya

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, h.77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh sebab itu penulis menggunakan teknik *total sampling*

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Pulau Kijang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

##### c. Data tersier

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi pasangan yang menikah Suku Bugisdengan suku melayu
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk secara lisan kepada pemuka adat, dan informan yang di pandang mengetahui permasalahan terlarangnya Suku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bugismenikah dengan suku yang lain tersebut, dalam hal ini wawancara penulis di tujukan pada tokoh adat, alim ulama dan tokoh masyarakat.

- c. dokumentasi

### 6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul, data tersebut di klasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, di hubungkan antara satu dengan yang lain, serta dibandingkan, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

### 7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

### F Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum penelitian, yang terdiri dari: Sejarah, Struktur, Geografis dan Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang.

BAB III : Kerangka Teoritis: Tinjauan Umum tentang larangan pernikahan dalam Islam, yang terdiri dari: Pengertian dan tujuan pernikahan menurut Hukum Islam, Rukun dan Syarat dalam Pernikahan dalam Islam, Wanita yang haram dinikahi dalam Islam, Larangan-larangan pernikahan dalam Islam. Tinjauan umum Tentang larangan pernikahan Suku Bugisdengan suku yang lain terdiri dari: Pengertian, Hukum, dan suatu hal terhalangnya pernikahan.

BAB IV : Larangan Adat tentang larangan Perkawinan Suku Bugispada adat Kelurahan Pulau Kijang. sejarah adat tentang larangan pernikahan Suku Bugisdengan suku melayu, pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap pelanggaran perkawinan menurut hukum adat yang ada RT 002 Kelurahan Pulau Kijang. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LOKASI PENELITIAN

#### A Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang

Nama Kecamatan Reteh Berasal dari nama sebuah sungai yakni Sungai Reteh yang memiliki 2 (dua) muara. Muara pertama terletak di perbatasan Kelurahan Sanglar dengan Kelurahan Pulau Kecil yang sekarang sebutannya parit 20 atau Reteh Lama. Muara kedua terletak diperbatasan Kota Baru dengan Kota Sebrida. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “letih” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak bertenaga capek setelah bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi kata Reteh.<sup>12</sup>

Sebagian besar lagi mengatakan bahwa Reteh berasal dari Sereth. Seret yaitu nama sebuah kampung di wilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan ke sebuah pemukiman di sungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut asal nama kampung mereka yakni Serith yang kemudian menjadi Reteh.

Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang. (kalakal Kesultanan Indragiri). Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang

<sup>12</sup>Profil Desa Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 7 Juli 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan di Kota Raja (Rengat). Daerah kekuasaan Kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Luar, Anak Serkaden Enok. Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan

Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan sebagai pejabat yang menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1883 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja Lung dengan gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai pengusaha di wilayah Reteh., Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah.

Sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1858 Reteh berada di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahan terletak di Kemuning. Pada tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan Belanda dalam pertempuranya di Kelurahan Benteng. Kerajaan Bintan kemudian dibubarkan berdasarkan Stbl. 19 jo 190 tgl. 1-3- 1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah pejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir (sekarang Camat) ke wilayah Reteh yaitu berturut-turut dari Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja Nung bin Ja"far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husen.

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amir Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu:<sup>13</sup>

1. Raja Hasan 1916-1917
2. Nursiwan 1917-1918
3. Sultan Palembang 1918-1932

<sup>13</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sidik 1932-1933
5. Mohd. Samin 1933-1935
6. Mohd Zein 1935-1937
7. Mohd. Sirin 1937-1939
8. Bismarak 1939-1941

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun 2006, terjadi pemekaran di Kecamatan Reteh hingga terbentuk beberapa kecamatan seperti Kecamatan Keritang. Kemudian Keritang mekar lagi menjadi Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Sungai Batang. Dengan demikian seluruh wilayah Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 Kelurahan dan 4 Kelurahan, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam dan Sungai Undan.<sup>14</sup>

Kelurahan Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Sejak berdirinya Pulau Kijang sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Kepala Kelurahan yang pertama kali menjabat sebagai kepala kelurahan Pulau Kijang yaitu Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981-

<sup>14</sup> Ibid.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Februari 1989. Setelah masa Jabatan Ahmad Abdullah berakhir maka digantikan oleh Muhammad Thaib yang masa jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989 - 12 Oktober 1991. Mohd Thair Thaib menjabat sebagai kepala kelurahan lebih kurang 2 tahun dan digantikan oleh Mohd Noer OE dan masa jabatannya lebih kurang yaitu 12 Oktober - 20 April 1995. Setelah masa jabatannya berakhir maka digantikan oleh A. Rasyid, AMP dan digantikan oleh Maspun Thaib setelah itu digantikan oleh Hardiansyah. Pada masa kepemimpinannya kantor tidak lagi berada di jalan Kelurahan melainkan telah dipindahkan ke jalan Sunan Gunung Jati Pulau Kijang dan sampai saat sekarang ini yang memegang jabatan sebagai Kepala Kelurahan adalah Ilhamzah.

#### B. Kondisi Geografis

Sedikit pemandangan Pulau Kijang dari perairan saat naik speed boat letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104 10" Bujur Timur – 102 32" Bujur Timur 0 36" Lintang Utara – 10 07" Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.160,597 Hektar. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2,300 Milimeter.

##### 1. Letak dan Luas Wilayah

Pulau Kijang merupakan bagian wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak tempuh transportasi darat dari Kelurahan Pulau Kijang ke Ibu Kota Kabupaten 90 Kilometer, sedangkan ke Ibu Kota Provinsi 360 Kilometer jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang ke Provinsi 350 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 11.050 Kilometer.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keadaan Alam

Kecamatan Reth merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa. Palawija dan hultikultural, berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

3. Iklim

Curah pada bulan September sampai dengan bulan Februari rata-rata 186 mm, membuat area sawah tadah hujan di Kecamatan Reth cukup untuk membuat suburnya tanaman tersebut. Pergantian musim hujan ke musim kemarau lahan sawah beralih berfungsi kepada lahan kedelai, jagung dan semangka. Di daerah pesisir, pada musim Barat adalah saat yang dinantikan-nantikan oleh para nelayan dimana produktifitas udang dan ikan meningkat sampai melebihi kebutuhan pasar. Sehingga hasil surplus ikan dan udang dipasarkan di Kuala Tungkal.

**Jumlah Penduduk**

**Tabel I.1**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	8.834	49.2%



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Perempuan	8.837	50.8%
	<b>Jumlah</b>	17.671	100%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang<sup>15</sup>

Jumlah penduduk di Pulau Kijang berjumlah 17.671 jiwa. Laki-laki berjumlah 8.834 orang (49,2%), dan perempuan berjumlah 8.837 orang (50,8%). Masyarakat Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, di mana daerah ini di huni berbagai suku bangsa. Penduduk Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa antar lain:

**Tabel I.2**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa**

No	Suku Bangsa	Jumlah	Presentase
1	Suku Jawa	5.301	35%
2	Suku Melayu	3.534	20%
3	Suku Banjar	3.004	17%
4	Suku Bugis	2.650	15%
5	Suku Minang	1.413	8%
6	Suku Batak	530	3%
7	China	350	2%

Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang

<sup>15</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya berakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku bangsa. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam wadah Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai, serta senantiasa membaur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.

#### D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan di Pulau Kijang tanahnya yang cukup luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 800 Hektar, jagung 02 Hektar, sayuran 65 Hektar. Kemudian bidang perkebunan yaitu kelapa 7.674 hektar, kopi 23 hektar. Dan bidang peternakan yaitu sapi 150 ekor dan kambing 200 ekor.

**Tabel I.3**

#### Perkebunan Kelurahan Pulau Kijang

No	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	7,674 Hektar
4	Kopi	23 Hektar

Sumber data : Kantor Pulau Kijang September tahun 2020





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.4**

**Komposisi Mata Pencharian Kelurahan Pulau Kijang**

No	Jenis Pekerjaan	Peresentase
1	Petani	30%
2	Perkebun	20%
3	Pegawai negri sipil	10%
4	Pension pegawai negri sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buruh	10%

*Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang September tahun 2020*

Masyarakat Pulau Kijang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 30%, di samping itu ada juga yang bekerja di pemerintahan baik itu Pegawai Negeri Sipil 10% pensiunan Pegawai Negeri Sipil 5%. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai Pedagang 10%, nelayan 15%, buruh 10%.

**E Pendidikan**

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental) maka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah-sekolah maupun swasta yang tergambar dalam bentuk table di bawah ini.

**Tabel I.5**

**Klasifikasi Penduduk RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak Sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Januari tahun 2020<sup>16</sup>

**F. Kepegawaian**

**Tabel I.7**

**Stuktur Kepegawaian Keluran Pulau Kijang**



<sup>16</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang<sup>17</sup>

#### Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. RT 002 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth seluruh Suku Bugis menganut kepercayaan agama islam.

**Tabel I.7**

**Jumlah Suku Bugis dan melayu Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Agama**

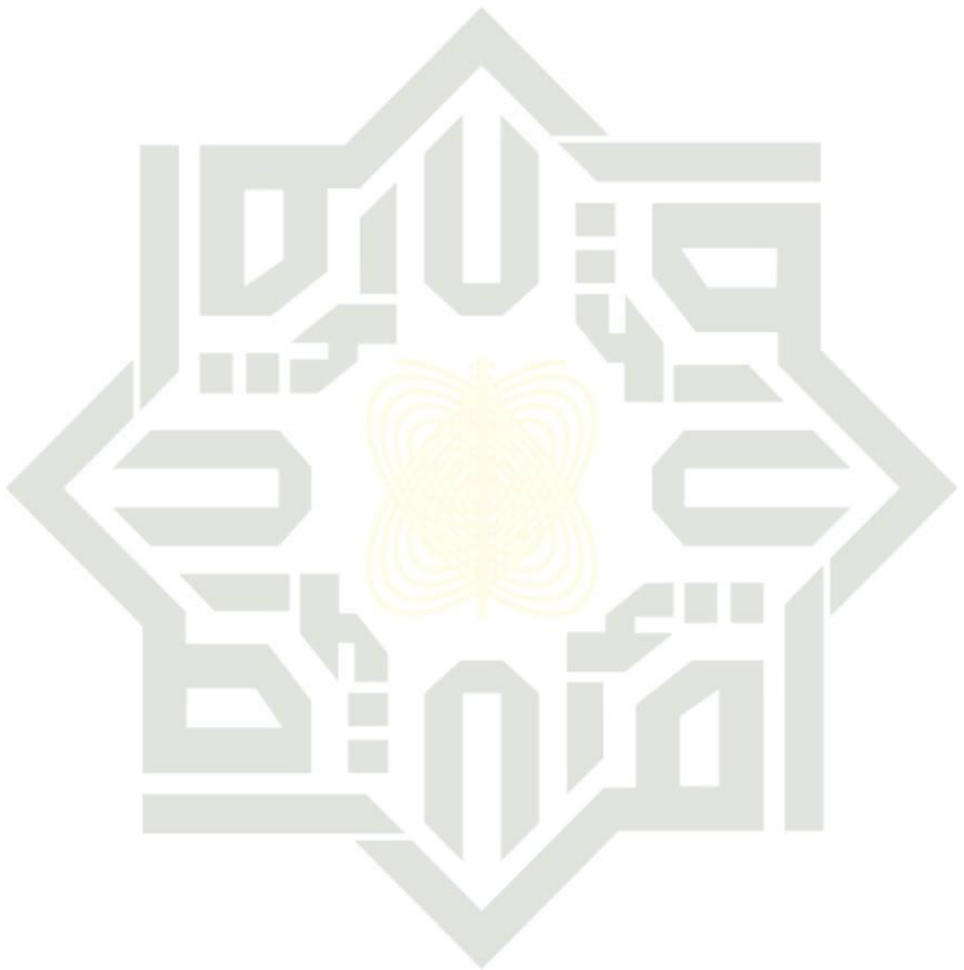
No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2.650	100%

<sup>17</sup> Ibid



No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	3.534	100%

Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang<sup>18</sup>



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Ibid





## A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: **نكاح - نكاحا - ينكح** yang berarti kawin atau menikah. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi'*) dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran.<sup>19</sup>

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau iktan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Wahbah al- Zuhailiy, *Fiqih al-Islam Adillatuh* Terjemahan, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke 6. h. 38-39.

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (PT. RajaGrafindo Jakarta, 2014), hal. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al- Qura“an telah dijelaskan dalam surah an-Nissa ayat 3 ;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (An-Nissa : 3)

Definisi lain yang berikan oleh beberapa mazhab:

Menurut hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja ” artinya kehalalan seorang laki-laki beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Dikalangan ulama syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawaja*.

Ulama golongan syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantaranya tidak boleh bergaul.<sup>21</sup>

Nikah jika di artikan akad sebagaimana di katakan didalam mazhab syafi'I akan menimbulkan hukum, yaitu tidak di akuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *sohr* dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada perkawinan antara anak yang haram dengan ibu kandungnya. Allah menyebutnya *mitsaqon ghalidhon* walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang di berikan oleh ulama syafi'iyah terlepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuannya adalah nilai-nilai yang sesuai dengan kesakralan.<sup>22</sup> Berpasang-pasang merupakan ciri hidup yang di tetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya, sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, setelah dia membekali masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran positif mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum islam yaitu Pasal 2 di nyatakan bahwa: perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan* (jakarta: Kencana, 2007). h.37

<sup>22</sup> Abdul Hadi, *fiqh munakahat*, (jakarta: CV karya Abadi, 2015) h.2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhon* menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan alami hidup manusia., berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram dan penuh kasih dan sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan pertengkaran yang di lakukan oleh salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan oleh pihak lain dapat diajukan alasan untuk mnegajukan pembatalan perkawinan.<sup>24</sup>

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*) pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). Berikut ada beberapa tujuan pernikahan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyatukan syahwatnya dan menumbuhkan rasa kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan yang dapat merusak diri.

<sup>23</sup> Neng Djubaedah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan yang tidak di catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 7





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menumbuhkan untuk bertanggung jawab, dan memberi nafkah lahir batin terhadap istri begitu sebaliknya istri kepada suami.
- e. Melahirkan keturunan yang dapat mengharumkan nama keluarga agama, bangsa dan negara.<sup>25</sup>

### 3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau sebuah peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan. Sedangkan Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum, jika salah satu hukum tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima (5) dan masing-masing mempunyai syarat-syarat dari rukun tersebut:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas oranya

<sup>25</sup> Sururin, Masfuah, Najib, Nur Rofi'ah, Muzainah Zaen. *Panduan fasilitator dan pelatih pendidikan kesehatan berproduksi bagi calon pengantin*. (Jakarta: Pucuk, pimpinan fatayat Nahdatul Ulama, 2006) h. 45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. perempuan
  - c. Jelas oranya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Jelas oranya
  - d. Mempunyai hak Perwalian
  - e. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab dan qobul
  - c. Dapat mngerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab dan Qobul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut
- d. Antara Ijab dan Qobul berhubungan yaitu tidak dipsah dengan kata-kata lain atau semisalnya
- e. Orang yang terkait dalam Ijab dan Qobul tidak terikat dengan ihrom haji dan umroh
- f. Majelis ijab dan qobul itu minimal dihadiri oleh empat (4) orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

#### 4. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi

Hukum pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan perkawinan dalam Islam.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat selamanya maupun sementara.<sup>26</sup>

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:

- a. Larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*)

<sup>26</sup>Said Bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah nikah* (Jakarta: pustaka amani, 2002) h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mahram muabbad*, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamannya, walaupun bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

- 1) Karena hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan *nasab* ini telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي ... ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan .

27 .

*Mahram* karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas.
- Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan isterimu atau cucu perempuan dan terus kebawah.

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an karim* (Jakarta: Hidakarya Agung: 1982), h. 111





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saudara perempuan yaitu semua saudara perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya. Termasuk didalamnya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.
- Bibi dari saudara perempuan dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayah atau kakek baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satunya termasuk juga saudara perempuan ayah kandung, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah seibu.
- Bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan ibu termasuk juga saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan ibu seayah, saudara perempuan ibu seibu.
- Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung seayah maupun seibu.
- Anak perempuan saudara perempuan<sup>28</sup>.

#### 2) Karena hubungan persusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain.

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-3. h. 45-46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yaitu:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ



Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) . . . ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu, . .*

..<sup>29</sup>

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu dan saudara susuan saja. Namun ayat ini diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

Artinya: *“Dari Aisyah RA, Berkata Rasulullah SAW: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena hubungan nasab (kelahiran) (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An Nasa’I dan Ibnu Majah)<sup>30</sup>.*

*Mahram* yang dilarang menikah karena hubungan *radha'ah* (persusuan) adalah:

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Badl Al-Majhud Fi Hal Abi Daud* (Lebanon; Dar Al-Kutub Al-Ilmiah: 2007) h. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada isteri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak lakilaki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan dari ibu susuan.
- Saudara perempuan dari bapak susuan.
- Cucu perempuan dari ibu susuan
- Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu<sup>31</sup>.

3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*).

*Mahram* karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23:

<sup>31</sup> Abdul Rahnman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet ke-3. h. 106-107.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...وَرَتَّبَكُمْ آلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ... ﴿٣٢﴾

Artinya: *Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau<sup>32</sup>.*

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- Ibu isteri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas.
- Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus kebawah.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Op.Cit.* h. 110.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan.
- Ibu tiri, sekalipun belum pernah digaulinya<sup>33</sup>

b. Halangan menikah untuk sementara (*mahram muaqqat*).

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

- 1) Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila istrinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adik bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
- 2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang menjalani iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.

<sup>33</sup> Said Bin Abdullah Bin Thalib al Hamdani, *risalah nikah* (Jakarta: Pustaka Amani 2002) Cet-2 h. 83-84.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wanita yang telah di talak tiga (*bain kubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnya.
- 4) Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
- 5) Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat an-Nur ayat 3. Menurut jumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang menikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara'. Maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan haram menikah dengan pezina. Menurut Madzhab Ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.
- 6) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya.
- 7) Nikah dengan wanita yang *dili'an*<sup>34</sup>.

Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', yaitu:

<sup>34</sup> Abdul Rahman al-ghazali, *kompilasi hukum islam diindonesia* (Jakarta: Akademi Parsindo, 1992) h. 111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin (mahar) antara keduanya<sup>35</sup>.

Para fuqaha' sepakat bahwa nikah *syighar* ini merupakan pernikahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW<sup>36</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّعَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ ابْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin antara keduanya (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>37</sup>."

Dengan demikian nikah *syighar* diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita. Pernikahan ini akan sah apabila diberi mahar *mitsil*.

### 2. Nikah *Muhallil*.

<sup>35</sup> Sayyid, Sabiq, *fiqh Sunnah* (Berut: al-Fikr:1983) h. 539.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *bidyatul mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007) h. 528

<sup>37</sup> Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Op.Cit.* hlm: 42. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). cet ke-2. h. 566.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dengan tujuan untuk menghalalkan kembali isteri yang ditalak tiga oleh suaminya. nikah *muhallil* ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam syari'at Islam, karena mengandung itikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam<sup>38</sup>.

Adapun yang menjadi dalil diharamkannya nikah *muhallil* adalah hadis Rasulullah SAW:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه احمد و ابو داود)

Artinya: "Dilaknat orang yang nikah *muhallil* dan *muhallal*hunya"  
(HR. Ahmad dan Abu Daud)<sup>39</sup>.

Jadi nikah *muhallil* itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

#### 3. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau dikatakan juga dengan nikah kontrak. Dikatakan nikah kontrak karena seorang laki-laki menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu, bisa seminggu, sebulan, dan setahun, berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit.* h. 531.

<sup>39</sup> Halil Ahmad al-Saharunfuri, *Op.Cit.* h. 44.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah mut'ah ini adalah hanya untuk bersenang-senang dan menyalurkan nafsu saja<sup>40</sup>

Menurut jumhur ulama nikah *mut'ah* ini telah disepakati keharamannya. Oleh sebab itu apabila terjadi nikah mut'ah maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, pernikahan ini tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksud dalam al-Qur'an. Kedua adalah karena nikah *mut'ah* hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketiga adalah karena nikah *mut'ah* membahayakan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah *mut'ah*.

## B. Konsep Urf Dalam Pernikahan

### 1. Pengertian urf

Urf atau 'urf ( merupakan istilah (العرف)Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan.'urf terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Adat ('urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Kata 'urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya'rufu sering diartikan dengan al-ma'ruf (المَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 523.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةً; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (يُعَوِّدُ-عَادَ) mengandung arti perulangan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata ‘urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

<sup>41</sup>Dahlan, A. R. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah. Tahun2010) hal 112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ia

## 2. Pembagian 'urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi kepada urf qauliy dan 'urf 'amaliy :

### a. Urf qauliy

Ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti kata walad (وَلَدٌ). Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

te Is

### b. 'urf 'amaliy

Ialah 'urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara' membolehkannya.

Itan Syarif Kasim Ri

<sup>4242</sup> Ibid hal 114



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, 'urf terbagi kepada 'urf 'amm dan 'urf khash:

#### 1. 'urf 'amm

ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A menyebutkan dalam bukunya bahwa 'urf 'amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut.

#### 2. 'urf Khash

ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Dr. H. Abd. Rahman, M. A. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Amzah, tahun 2010) hal. 210





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, 'urf terbagi kepada 'urf shahih dan 'urf fasid:

#### 1. 'urf Shahih

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti tradisi masyarakat Aceh dan Indonesia umumnya, menggunakan kain sarung dan kopiah/peci untuk shalat. Ataupun tradisi masyarakat membuat kue-kue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara walimatul 'ursy (pesta pernikahan), dan lain-lain.

#### 2. 'urf Fasid

Ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

### 3. Syarat-Syarat 'urf yang Dijadikan Sumber Hukum

Kembali Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A. menjelaskan dalam bukunya bahwa 'urf yang disepakati oleh seluruh ulama keberlakuannya adalah *Al- 'urf ash-shahih al-amm al-muththarid* ('urf yang benar dan hukumnya berlaku secara umum), dengan syarat sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qath'I, dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip.

#### 4. Kedudukan 'urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah."*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf antara lain sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum."*

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : *"Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'."*



Cipta milik U

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf.”

Oleh ulama Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (qiyâs yang tidak ditemukannya ‘illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syâfi’iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>44</sup> Berikut ini beberapa contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam:

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘urf, kata daging (لَحْمٌ) tidak diartikan dengan kata ikan (سَمَكٌ).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima’afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah ‘urf

#### 5. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan ‘urf

<sup>44</sup> Ibid hal 216



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum-hukum yang berdasarkan ‘urf itu sendiri dapat berubah menurut perubahan ‘urf pada suatu masa atau perubahan lingkungan. Oleh para fuqaha’ mengatakan mengenai perbedaan-perbedaan yang timbul dalam masalah fiqh, merupakan perbedaan yang terjadi disebabkan perbedaan ‘urf, bukannya perbedaan hujjah atau dalil yang lainnya.

Sebagai contoh di dalam mazhab Syafi’i dikenal adanya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi’i. Hal ini disebabkan perbedaan ‘urf di lingkungan tempat tinggal Imam Syafi’i sendiri.

Dalam konteks ini dikenal kaidah yang menyebutkan :

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya : Suatu hukum berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan lingkungan.

Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kaku serta ketinggalan zaman adalah salah. Islam berjalan seiring dengan perkembangannya zaman. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum yang dapat berubah di sini terjadi pada hukum yang berdasarkan dalil zhanni. Dalam hukum yang berdasarkan dalil qath’i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka tidak boleh ada perubahan, seperti perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, pengharaman riba, dan sebagainya.

Hukum yang dapat berubah karena ‘urf ini dapat kita contohkan seperti pendapat Abu Hanifah bahwa kesaksian seseorang yang dhahirnya tidak fasik dapat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dijadikan saksi, kecuali pada kasus hudud dan qisas. Akan tetapi, murid beliau Abu Yusuf menyatakan bahwa kesaksian baru dapat diterima setelah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut. Pendapat Imam Abu Hanifah sejalan dengan masanya karena pada umumnya akhlak dan agama masyarakat masih dipegang teguh dan terpelihara.<sup>45</sup>

### C Ketentuan Adat Pernikahan Suku Bugis

Adapun tahapan dari proses perkawinan adat Bone secara umum dapat dibagi atas tiga tahapan, yaitu tahapan pra nikah, nikah, dan tahapan setelah nikah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan dijelaskan tahapan perkawinan secara berturut-turut.

#### 1. Madduta Massuro l Lettu

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan (*Mappabotting*) dilaksanakan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, jagan sampai tingkatan pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar. *Madduta* artinya meminang secara resmi, dahulu kala dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat.

<sup>45</sup> *Op.cit* hal 120



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Mammanu'-manu

*Mammanu'-manu'* bermakna seperti burung yang terbang kesana kemari, untuk menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan di hati. Langkah pendahuluan ini biasanya ditugaskan kepada seseorang biasanya kepada para paruh baya perempuan, yang akan melakukan kunjungan biasa kepada keluarga perempuan untuk mencari tahu seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar. *Mappésé-pésé* dilakukan setelah kunjungan pertama tadi (*Mammanu'-manu'*) yaitu melakukan kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung dan sangat halus (“ada orang yang akan mendekati anda..... Sudah adakah yang berbicara dengan anda?.....sudah adakah yang punya?..... Apakah pintu masih terbuka?....”) agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka atau malu seandainya pendekatan ini tidak membuahkan hasil. Jika keluarga perempuan memberi lampu hijau, kedua pihak kemudian menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi (*Madduta*). Selama proses pelamaran ini berlangsung garis keturunan, status kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan *sompa* dan uang antaran (*Dui ménré*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya perkawinan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

## 3. Mappettu Ada

*Mappettu Ada* yang biasanya juga ditindak lanjuti dengan (*mappasierekeng*) atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dibicarakan bersama pada proses sebelumnya. Ini sudah merupakan lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan. Pada saat inilah akan dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil. Ini sangat penting karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat bersama, kemudian dikuatkan kembali keputusan tersebut (*mappasierekeng*). Pada kesempatan ini diserahkan oleh pihak laki-laki *pattenre' ada* atau *passio* ("pengikat") berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka (*Panasa*) yang mengibaratkan harapan (*minasa*); dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka *passio* ini diiringi *passuro mita psuro mit* yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati.

- Satu lembar bahan *waju tokko*
- Satu lembar sarung sutera atau *lipa' sabbé*, juga disertai dengan;
- Satu piring besar nasi ketan (*sokko*)
- Satu mangkok besar *palopo'* (air gula merah yang dimasak dengan santan dan diberi telur ayam secukupnya)
- Dua sisir pisang raja

Pada saat *Mappettu ada* akan disepakati beberapa perjanjian, di antaranya:

<sup>46</sup> Mursalim, S.Pd.,M.Si. "adat pernikahan suku bugis sulawesi selatan" (jakarta : gema insani; 2010) hal 17



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Sompa

*Sompa* artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Besarnya *sompa* telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis.

Penggolongan *sompa* tidaklah selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam

bentuk mata uang “real” dan ada pula dalam bentuk “kati” tetapi dalam buku ini

secara umum adalah sebagai berikut:

- Bangsawan tinggi 88 real
- Bangsawan menengah 44 real
- Arung palili 28 real
- Golongan tau maradeka 20 real
- Golongan ata (budak) 10 real

Pada akhir abad ke-19 besarnya mas kawin (*sompa*) ditetapkan berdasarkan status seseorang. Setiap satuam mas kawin disebut *kati* (mata uang kuno) satu *kati* senilai dengan 66 ringgit, atau sama dengan 88 real, 8 uang (8/20 rial) dan 8 duit (8/12 uang) dan setiap *kati* akan harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 real dan seekor kerbau yang bernilai 25 real. *Sompa* bagi kalangan perempuan bangsawan kelas tinggi *Sompa bocco'* atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*. Sedangkan bagi perempuan bangsawan terendah hanya 1 *kati*, dan orang baik-baik atau *tau deceng* setengah *kati*, dan kalangan baiasa hanya seperempat *kati*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem perhitungan ini masih berlaku sampai sekarang, tetapi sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia, maka mata uang ringgit (dulu senilai 2,5 rupiah atau 2,5 gulden Belanda) yang dihadikan satu perhitungan. Namun karena inflasi dan turunnya harga rupiah pada awal 1960 maka jelas *sompa* ini tidak berlaku lagi. Namun *Sompa* ini masih sangat penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi karena hadiahhadiah tambahannya, termasuk di dalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah, nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisonal).

#### b. Dui ménré, atau Dui balanca

*Dui ménré* adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pasa saat *mappettu ada* (*mappasierekeng*). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. *Dui ménré* ini akan digunakan oleh pihak perempuan dalam rangka membiayai pesta perkawinannya. Pada tahun 1975 Susan Millar dalam bukunya *Wedding Bugis* menunjukkan bahwa besarnya *dui ménré* berkisar antara Rp 2.000 sampai dengan Rp. 5000,-. (Pelras. C, 2006) Di kondisi kekinian di mana kekuasaan politik tradisional semakinmemudar *dui ménré* semakin lama semakin mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena tidak ada lagi aturan dan pihak pihak yang berwenang menegakkan aturan adat.



#### 4. Akad Nikah

Orang bersiap melakukan akad nikah adalah bapak atau wali calon mempelai perempuan atau imam kampung atau salah seorang yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Pengantin laki-laki duduk bersila siap melaksanakan akad nikah. Acara akad nikah dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pernikahan, penandatanganan berkas dan juga *sompa*. Pihak yang bertandatangan adalah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan 2 orang saksi. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan perwalian dari orang tua atau wali pengantin perempuan kepada imam kampung/penghulu yang akan menikahkan. Orang tua atau wali perempuan mengucapkan, “dengan mengucapkan Bismillahi Rahmani Rahim saya orang tua/wali pengantin perempuan menyerahkan perwalian kepada imam kampung/penghulu untuk menikahkan anak saya dengan laki-laki (disebutkan nama pengantin laki-laki).

Ijab kabul dilakukan dengan didahului oleh khutbah nikah oleh imam kampung atau orang yang ditunjuk oleh undang-undang. Ijab kabul dilakukan dengan pengantin laki-laki berhadapan dengan imam lalu saling berpegangan ibu jari kanan sebelumnya. Pengantin laki-laki dibimbing oleh imam untuk menjawab pertanyaan imam, setelah merasa lancar maka ijab kabulpun dilaksanakan. Beberapa bacaan yang diucapkan oleh imam harus diikuti oleh pengantin laki-laki seperti: *istigfar*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syahadatain, shalawat, lalu ijab kabul. Ucapan ijab kabul diucapkan oleh imam dengan mengatakan “saudara A bin B saya menikahkan engkau atas

Proses ijab kabul ini biasanya diulang 2-3 kali untuk memperjelas ketepatan jawaban laki-laki. Setelah itu pengantin laki-laki membaca *sighat taklik talak*.

Selama proses ini mempelai perempuan tetap berada di dalam kamar pengantin yang telah dihiasi *lamming* dan didampingi oleh:

ka Riau

- 2 orang *passeppi*
- 1 orang *balibotting*
- 3 orang *pattiwi cere'*
- 2 orang *indo' pasusu*

Mereka ini merupakan pendamping yang dahulu kala harus disesuaikan dengan tingkat derajat pengantin, dan disesuaikan dengan jumlah dari pendamping pengantin laki-laki yang dibawa.

Apabila pengantin perempuan merupakan puteri bangsawan, maka selain ia dinaungi *lellu'* ia juga dipangku oleh seorang perempuan atau *indo' pasusu* sendiri selama akad nikah dilakukan.

niversity

#### 5. Upacara Sesudah Akad Nikah

- Mapparola

Acara ini merupakan juga prosesi penting dalam rangkaian perkawinan adat Bone, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi merupakan sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar

rif Kasim Ri



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Kegiatan biasanya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.

Pada hari yang disepakati untuk proses *mapparola/marola* (*mammatoa*) kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan upacara *mapparola*.

Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali dirias seperti pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengringnya, seperti *balibotting*, *passeppi*, pembawa cerek, pembawa tombak, pembawa payung, pembawalellu', *indo' pasusu*.

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian *waju tokko* hitam dengan menghamburkan *wenno*, sebagai *pakkuru sumange'* (ucapan selamat datang).

Dalam acara *mapparola* ini biasanya dilakukan juga *makkasiwiang* yaitu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudar-saudaranya. Hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh *indo' botting* untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan saudara pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan.<sup>47</sup>

- b. Marola wekka dua

Pada *marola wekka dua* ini, mempelai perempuan biasanya hanya bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai kembali ke rumah mempelai perempuan.

- c. Ziarah kubur

Meskipun banyak pihak mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan adat Bone namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sangat sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bone, yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan.

- d. Cemmé-cemmé atau mandi-mandi

Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bone bahwa setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi di suatu tempat.

- e. *Esso akkalabinengeng* (hari akad nikah)

Akad nikah merupakan bagian paling utama atau aulu agaukE *ulu aggaukeng*, dan acara kunci dalam pernikahan. Pada intinya akad nikah adalah

<sup>47</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan.

Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan.<sup>48</sup>

Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat yang sederhana Ijab dan Qabul terjadilah perubahan besar, yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab. Maka nafsupun berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Begitu besarnya perubahan ini sehingga Al-Quran menyebut akad nikah sebagai *Mitsaqan Ghalidzha* (perjanjian yang berat). Hanya 3 kali kata ini disebut dalam Al-Quran. Pertama, ketika Akkah membuat perjanjian dengan Nabi dan Rasul Ulul-Azmi (QS 33: 7). Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah (QS 4:154).

Akad nikah bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut laki-laki, atau sekedar formalitas untuk mensahkan hubungan suami istri, atau bahkan adat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan. Akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kokoh dan kuat. Akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syariah, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya.

Perjanjian agung menghalalkan kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya. Perjanjian kokoh yang tidak boleh dicerai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri. Allah SWT berfirman, “Dan

<sup>48</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang besar? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (An-Nisaa:20-21).*

Pemaknaan lain dari perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad yang menghalalkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Sehingga pernikahan bisa dipahami sebagai; aqad untuk beribadah kepada Allah, aqad untuk menegakkan syariah Allah, aqad untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan juga aqad untuk meninggalkan kemaksiatan, aqad untuk saling menghormati dan menghargai, aqad untuk saling menerima apa adanya, aqad untuk saling mengautkan keimanan, aqad untuk saling membantu dan meringankan beban, aqad untuk saling menasehati, aqad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dalam sakit dan sehat.

Pernikahan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, aqad untuk saling melindungi, aqad untuk saling memberi rasa aman, aqad untuk saling mempercayai, aqad untuk saling menutupi aib, aqad untuk saling mencurahkan perasaan, aqad untuk berlomba menunaikan kewajiban, aqad untuk saling memaafkan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan, aqad untuk tidak menyimpan dendan dan kemarahan, aqad untuk tidak mengungkit-ungkit kelemahan, kekurangan dan kesalahan.

Pernikahan adalah aqad untuk tidak melakukan pelanggaran, aqad untuk tidak saling menyakiti hati dan perasaan, aqad untuk tidak saling menyakiti badan, aqad untuk lembut dalam perkataan, santun dalam pergaulan, aqad untuk indah dalam penampilan, aqad untuk mesra dalam mengungkapkan keinginan, aqad untuk saling mengembangkan potensi diri, aqad untuk adanya keterbukaan yang melegakan, aqad untuk saling menumpahkan kasih sayang, aqad untuk saling merindukan, aqad untuk tidak adanya pemaksaan kehendak, aqad untuk tidak saling membiarkan, aqad untuk tidak saling meninggalkan.

Pernikahan juga bermakna aqad untuk menebarkan kewajiban, aqad untuk mencetak generasi berkualitas, aqad untuk siap menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak, aqad untuk membangun peradaban, aqad untuk segala yang bernama kebaikan.<sup>49</sup>

### State

#### f. *Mapparola*

Konsep keseimbangan tergambar dalam prosesi ini, dimana pihak perempuan berkunjung pula ke rumah pihak laki-laki. Hikmah yang dapat diambil dari *mapparola* ini adalah menyambung tali silaturrahi antara dua keluarga besar.

Hikmah yang lain adalah, dengan *mapparola* ini pengantin perempuan dapat memberikan penghargaan dan kasih sayangnya kepada orang tua suaminya (mertua) yang disimbolkan dengan pemberian sarung pada saat *makkasiwiang*.

<sup>49</sup> Dra. H iffah muzammil fiqh munakahat (tangerang :ismart) hal 67



Dengan kegiatan ini diharapkan kedua pasangan ini mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua tanpa ada perbedaan, sehingga kehidupan rumah tangganya senantiasa dinaungi oleh keridoan orang tua yang berujung kepada keridhoan Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Dari pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan Suku Bugis dengan suku yang lain merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang berada di kelurahan pulau kijing kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir mereka menganggap apabila mereka melanggar pernikahan tersebut mereka akan mendapati suatu musibah besar yang akan menimpa keluarga mereka, serta larangan ini juga sangat berdampak kepada tidak adanya kerukunan dalam berkeluarga, bermasyarakat dapat memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan keluarga dan dapat menimbulkan permusuhan antar suku.
2. Di tinjau menurut hukum islam, larangan Suku Bugis menikah dengan suku yang lain bertentangan dengan hukum islam, karena adat telah melarang apa yang seharusnya di halalkan oleh Allah SWT yaitu pernikahan. Jika masyarakat RT 002 Kelurahan Pulau Kijing ingin melaksanakan pernikahan tersebut hukumnya ialah *mubah* (boleh), karena tidak adanya nash yang melarang pernikahan berbeda suku, selain itu mereka juga bukan mahram, dan pernikahan ini bukanlah pernikahan yang dilarang dalam Islam. larangan pernikahan yang di lakukan oleh para leluhur tidaklah sesuai dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

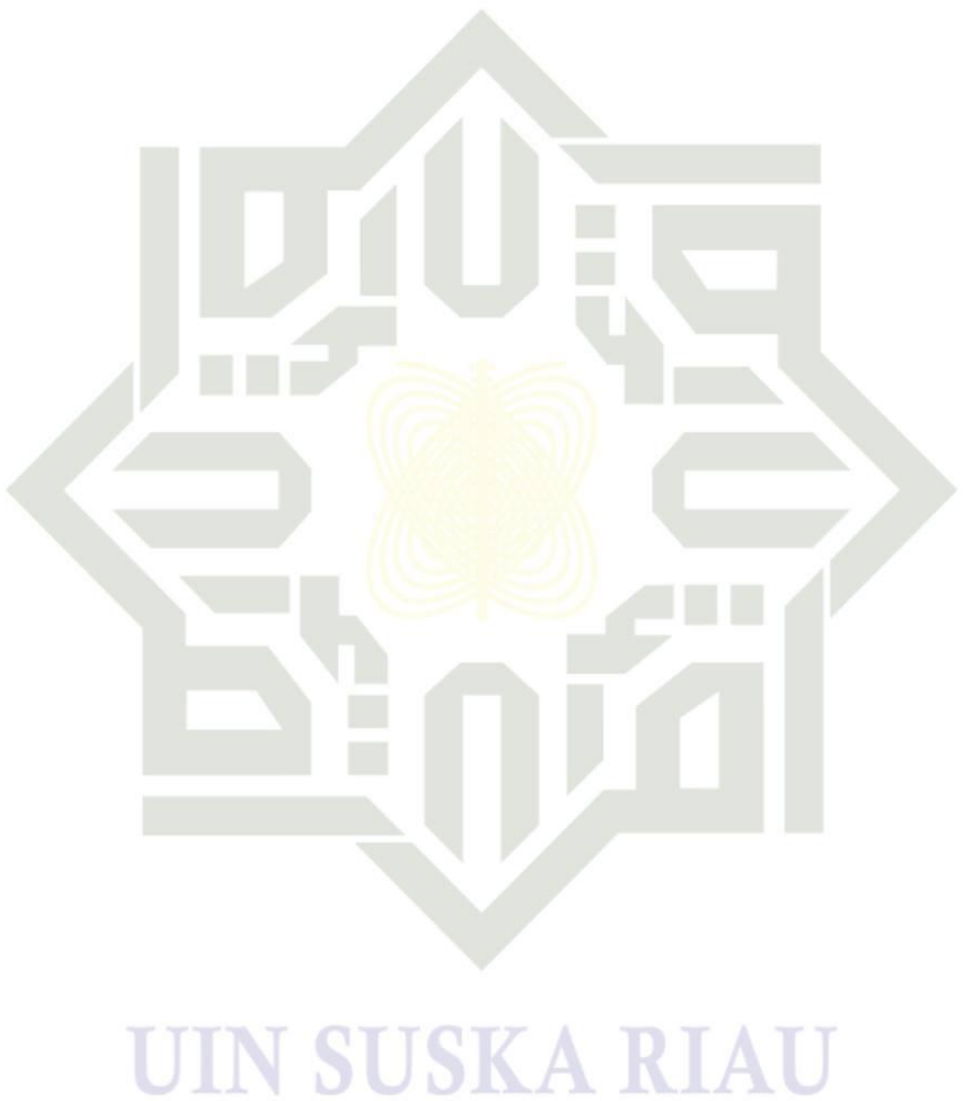
ketentuan Islam, adapun sanksi bagi yang melanggar larangan perkawinan tersebut walaupun hanya dalam kurun waktu 1 tahun berlakunya sanksi tersebut juga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum Islam, yakni melanggar hak-hak manusia, serta dapat menimbulkan permusuhan dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi antar sesama suku dan agama.

3. Dalam alquran dan hadits tidak adanya ditemukan mengenai larangan pernikahan yang dilandasi atas keyakinan yang ada secara turun temurun dan dari generasi ke generas. Mereka mempercayai dan berpegang teguh kepada larangan yang di wariskan oleh para leluhur mereka terdahulu. Masyarakat khususnya mengetahui bahwa tidak ada ayat ataupun hadits yang melarang, namun larangan tersebut dipercayai dan takut akan ada hal yang buruk menimpa keluarga mereka. Selain itu hukum ini masih berlaku umum bagi mereka yang masih mempercayai apa-apa yang telah di wariskan oleh nenk moyang mereka, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah benyak memiliki pengetahuan dan pergaulan yang luas untuk tidak melarang anak-anak mereka menikah dengan suku melayu. Didalam sistem kompilasi hukum islam juga (KHI) juga tidak di temukannya adanya larangan adat Suku Bugismenikah dengan suku melayu.

#### Saran

1. Hendaknya pemuka agama dan para tokoh-toko adat melakukan pengkajian ulang mengenai larangan adat Suku Bugismenikah dengan suku yang lainyang ada pada zaman dahulu, karena peran para tokoh-tokoh adat dan

pemuka agama sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembaharuan aturan dan anggapan masyarakat mengenai larangan adat Suku Bugismenikah dengan suku melayu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. 2015. *fiqh munakahat*. Jakarta: CV karya Abadi
- Abdul Ranhman al-Ghazali. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. cet ke-3.
- Abdul Rahman al-ghazali. 1992. *kompilasi hukum islam diindonesia*. Jakarta: Akademi Parsindo.
- Abani. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. cet ke-2.
- Ahmad Hatta. 2009. *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka,.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Bandung: Nusa Media.
- D. H. A. Hasan Ridwan. 1994. *polemic pernikahan*, Semarang: Grafindo.
- Halil Ahmad al-Saharunfuri. 2007. *Badl Al-Majhud Fi Hal Abi Daud* Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Ibnu Rusyd. 2007. *bidyatul mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: BulanBintang. cet ke-3.
- Majid Sulaiman Daudin. 2014. *Kado untuk suami istri*, Jakarta: gema insani.
- Muhammad Iqbal. 2015. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud Yunus. 1982. *Tafsir Qur'an karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Neng Djubaedah. 2010. *pencatatan perkawinan dan perkawinan yang tidak di catat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said Bin Abdullah bin Thalib al Hamdani. 2002. *Risalah nikah*. Jakarta: pustaka amani.
- Saifuddin Azwar. 2010. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayyid, Sabiq. 1983. *fiqh Sunnah*. Beirut: al-Fikr.
- Sperjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. PT. RajaGrafindo Jakarta.
- Wahbah al- Zuhailiy. 2011. *Fiqh al-Islam Adillatuh* Terjemahan. Jakarta: Gema Insani. cet ke 6.
- Wasman. 2011. *Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Mitra Utama.
- Zinuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *"larangan Suku Bugis menikah dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir di tinjau menurut Hukum Islam"* yang ditulis oleh :

Nama : ABD AZIS  
NIM : 11521103931  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Jl. Kamboja, Panam, Pekanbaru, melalui (Google Meet)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2018  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi M.Ag**

Sekretaris  
**H. Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Aslati M.Ag**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Kasub Bag Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jafinus S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : ABD. AZIS**  
**NIM : 11521103931**  
**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**  
**JUDUL : LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU LAIN DI**  
**KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INFRAGIRI HILIR**  
**DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.**

**Pembimbing: Ade Faris Fakhruallah, M.Ag.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42461  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5273/2021 Tanggal 6 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

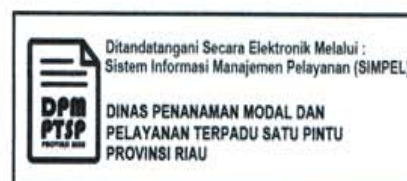
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ABD AZIS  |
| 2. NIM / KTP         | : 11521103931   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU MELAYU DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEL. PULAU KIJANG, KEC. RETEH, INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Juli 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/44

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42461 Tanggal 9 Juli 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ABD AZIS**  
 NIM : 11521103931  
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1  
 Alamat : Jl. Hidayat RT.003 RW.001 Desa Metro Kec. Reteh  
 Judul Penelitian : **LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU MELAYU  
 DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**  
 Lokasi Penelitian : **KEL. PULAU KIJANG, KEC. RETEH KABUPATEN INDRAGIRI  
 HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli s/d 14 Oktober 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 14 Juli 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



**MARLIS SYARIF, S.Sos.MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19640310 198703 1 008

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**KECAMATAN RETEH**  
**KELURAHAN PULAU KIJANG**

Jl. Sunan Gunung Jati No. 01 Telp. 0768-329017

**REKOMENDASI**

Nomor : 09/REK-PK/VII/2021

TENTANG

PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PENELITIAN/RISET

Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021 tanggal 14 Juli 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

**N a m a** : **ABD AZIS**  
**NIM** : 11521103931  
**Pangkat Studi/Jenjang** : Hukum Keluarga / S1  
**A l a m a t** : Jl. Hidayat RT.003 RW.001 Kec. Reteh  
**Judul Penelitian** : **LARANGAN SUKU BUGIS MENIKAH DENGAN SUKU MELAYU DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**Lokasi Penelitian** : **KEL. PULAU KIJANG, KEC. RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian terhitung mulai 14 Juli s/d 14 Oktober 2021.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 15 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
LURAH PULAU KIJANG  
KELURAHAN PULAU KIJANG  
**SURYA INDRA, S.Pd**  
NIP. 196906242005011003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT PENULIS



Nama lengkap Abd Azis , lahir pada tanggal 15 Januari 1996 di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, Ayah. Ramli Usman dan Ibu Marwiyah. Adapun Riwayat Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh sebagai berikut, Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah DDI Pulau kijang, lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Madrasah Tsanawiyah DDI Pulau kijang dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MA (Madrasah Aliyah) Pesantren Modern Dar'el Hikmah Pekanbaru, pada tingkat ini penulis aktif di organisasi OSDH (Organisasi Satnri Dar'el Hikmah) sebagai waka dakwah dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui jalur PMB- MANDIRI.

Dalam masa perkuliahan penulis melakukan Magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor KUA Marpoyan Damai pada tahun 2017, dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pulau Harapan Kec. Pinggir Kerinci Kab. Bengkalis pada Agustus 2018. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap larangan suku Bugis menikah dengan suku lain. Alhamdulillah atas anugerah dan hidayah Allah SWT pada tanggal 09 Agustus 2021 penulis Munaqasyah dalam ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga dengan judul: “Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjau Menurut Hukum Islam” dan dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar (SH) di bawah bimbingan Bpk. Ade Fariz Fakhrrullah M.Ag Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.